



Mkt+



MERAKIT KERANGKA REFORMASI STRUKTURAL

Skenario kebijakan fiskal tahun depan disusun fleksibel, responsif, namun tetap hati-hati. KEM PPKF 2022 mencatatkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural sebagai agenda utama. Penguatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi tak boleh tertunda.

Daftar Isi

APBNKITA

04 Realisasi APBN 2020

DARI LAPANGAN BANTENG

05 Tak Ada Yang Lebih Bijak Dari Bertindak

PHOTO STORY

06 Tari Asli dari Bali

LAPORAN UTAMA

08 Menuju APBN 2022

10 Reformasi Struktural, Haruskah Segera?

12 Infografik

WAWANCARA

14 Menjaga Budaya dan Sejarah Lewat Aksara

FINANSIAL

16 Tahun Ajaran Baru Segera Tiba, Dana Pendidikan Apa Kabar?

TEKA-TEKI

18 Teka Teki

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:**

Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. **Penanggung**

Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.

Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan

Informasi Rahayu Puspasari. **Pemimpin Redaksi:** Kabag

Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:**

Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:**

Ferry Gunawan, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar

Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari,

Teguh Warsito, Hadi Surono, Budi Prayitno, Budi Sulisty. **Tim Redaksi:**

Reni Saptati D.I, Rita Nurhayati, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah

Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Andi

Abdurrochim, Arif Miftahur Rozaq, Luqman Hakim, Muhammad Irfan,

Indah Sandary Putri Jayus, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri,

Mahardika Argha Mariska, Kurnia Fitri Anidya, Muhammad Ripurio,

Berliana, Ni Made Ary Ramayanti, Intan Nur Shabrina **Redaktur Foto:**

Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Andi Abdurrochim. **Desain Grafis**

dan Layout: Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska, Muhammad Fithrah **Alamat Redaksi:**

Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst.

6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.



Foto Cover Resha Aditya

COVER STORY:

KEM-PPKF Tahun 2022 merupakan dokumen kerangka arah kebijakan ekonomi makro untuk tahun 2022. Kami menggambarkan KEM-PPKF seperti kerangka mobil mainan yang sedang dirakit. Mobil tersebut dirakit mulai dari menyusun kerangka (*chassis*) dan komponen utamanya agar pada saat penyusunan komponen berikutnya tidak melenceng dari kerangka yang telah disusun.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan.

Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.



Realisasi APBN 2021 (Per 28 Februari 2021)

Pendapatan Negara

Rp584,99 triliun

Belanja Negara

Rp723,05 triliun

(Rp36,36) triliun

Keseimbangan Primer

Surplu/(Defisit)Anggaran

(Rp138,06) triliun

Pembiayaan Anggaran

Rp392,25 triliun

Tak Ada Yang Lebih Bijak Dari Bertindak

Mengawali pertengahan tahun ini, beberapa kota disuguhi hujan. Meski sesekali, hujan di tengah musim kemarau nampaknya cukup melegakan dan menjadi penyejuk di tengah situasi terik dan tak pasti di mana kasus COVID-19 di sejumlah kota kembali meningkat. Meski berada di situasi ketidakpastian, beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2022 di depan Rapat Paripurna DPR RI. Dokumen KEM PPKF tahun 2022 merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun depan. Dokumen inilah yang akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022.

Perekonomian global dan nasional masih berada dalam situasi pandemi yang secara fundamental telah mengubah perkembangan dan tatanan

sosial ekonomi tak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Tak mudah memang merencanakan segala sesuatunya dalam keadaan yang begitu dinamis. Namun, pemerintah harus tetap mampu merancang kebijakan fiskal tahun depan yang fleksibel, responsif, dan tetap hati-hati.

KEM PPKF tahun 2022 mengambil tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Tema reformasi struktural menjadi salah satu tindakan pemerintah yang tetap dilakukan demi mewujudkan Indonesia Maju. Terlebih, pengalaman menunjukkan bahwa krisis selalu menyediakan kesempatan baik untuk melakukan reformasi. Krisis dari pandemi COVID-19 juga akan menjadi momentum untuk memperkuat reformasi, reformasi pascapandemi.

Sama halnya hujan di tengah musim kemarau, situasi pandemi sebaiknya dimanfaatkan untuk bertindak melakukan pembenahan. *Tak ada yang lebih bijak. Dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya. Yang ragu-ragu di jalan itu.*

Begitulah kira-kira Sapardi Djoko Damono menggambarkan ketabahan dan kesabaran atas sebuah rasa syukur datangnya hujan yang turun di musim kemarau di bulan Juni. Dalam situasi pandemi ini, maka tak ada yang lebih bijak dari terus bertindak.

Rahayu Puspasari

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu



Tari Asli dari Bali

Teks Anas Nur Huda Foto Adhi Kurniawan

Tari Barong adalah salah satu pusaka budaya yang dimiliki Bali. Tari yang dipentaskan secara kolosal ini melambangkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Barong adalah sosok binatang berkaki empat yang menyimbolkan kebaikan, sedangkan Rangda adalah sosok jahat yang tampil menyeramkan dengan sepasang taring tajam di mulutnya. Para penari dan penabuh musik adalah masyarakat lokal yang tergabung dalam paguyuban seni. Mereka adalah para maestro yang memiliki peran penting dalam melestarikan pusaka budaya ini. Pada tahun 2015, UNESCO menetapkan Tari Barong sebagai warisan budaya dunia tak benda (*intangible cultural heritage*).



Menuju APBN 2022

Teks OS, Purwowidhu Foto Irfan Bayu

A PBN 2020 dan 2021 bekerja keras menahan goncangan krisis pandemi COVID-19 agar perekonomian tidak berkontraksi lebih dalam. Belanja pemerintah menjadi bantalan pergerakan roda ekonomi kala aktivitas ekonomi lainnya tumbuh negatif. Di 2020, laju kontraksi ekonomi berhasil ditekan pada angka -2,07 persen, lebih moderat dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sinyal pemulihan berlanjut di kuartal I 2021. Hampir semua indikator ekonomi dan bisnis menunjukkan tren positif. Ekonomi pun tumbuh -0,74 persen.

Seiring pelanjutan kerja keras APBN di 2021, pemerintah telah merancang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022. Dokumen KEM-PPKF yang disampaikan kepada DPR RI pada 20 Mei 2021 tersebut digunakan sebagai

bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan RAPBN 2022.

Bukan perkara mudah merancang kebijakan fiskal 2022. Mengingat dinamika perekonomian global dan domestik masih dibayangi ketidakpastian tinggi akibat ancaman penyebaran pandemi yang belum usai dan perkembangan varian baru COVID-19. Di tengah tantangan itu, pemerintah dan DPR harus mampu merancang kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur.

Konsolidasi fiskal

APBN 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN normal pada 2023, di mana defisit anggaran akan kembali berada di bawah 3 persen, sebagaimana diamanatkan oleh UU No.2 Tahun 2020. Karena itu, pemerintah merancang arah konsolidasi fiskal 2023 sebagai upaya pendisiplinan fiskal untuk penyehatan

APBN agar keberlanjutan fiskal sebagai komponen pemulihan jangka menengah-panjang terjaga. Tujuan tersebut ditempuh pemerintah dengan cara menurunkan defisit, meningkatkan penerimaan negara secara bertahap, dan mengendalikan belanja negara. Defisit anggaran yang tahun ini direncanakan sekitar 5,7 persen PDB akan diturunkan menjadi 4,85 persen di 2022. Sementara rasio perpajakan 2022 diperkirakan pada kisaran 8,37-8,42 persen terhadap PDB.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengharapkan pemerintah memiliki level of confidence yang tinggi, optimis tetapi tetap realistis untuk mencapai target penerimaan pajak yang disepakati. Menurutnya, langkah ini dibutuhkan untuk meminimalisir shortfall pajak yang besar dan menjaga kinerja keseluruhan. Ia juga berharap pemerintah hendaknya sudah memiliki manajemen risiko dan disiplin fiskal

Penyampaian dokumen KEM-PPKF TA 2022 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Ketua DPR Puan Maharani pada 20 Mei 2021.

serta *extra effort* yang terukur dalam mengantisipasi setiap perubahan situasi di 2022. “Sehingga, tidak perlu lagi menambah defisit yang sudah menjadi beban anggaran yang relatif besar. Agar kredibilitas dan keberlanjutan APBN 2022 tetap terjaga dengan baik,” ucap Said.

Berbeda pandangan, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah Redjalam melihat ruang fiskal yang ada masih bisa lebih dioptimalkan untuk menanggulangi pandemi dan menyelamatkan para pelaku ekonomi. Terlebih, pemerintah juga menghadapi ketidakpastian waktu berakhirnya pandemi. Dengan batas defisit sesuai undang-undang dan ketentuan umum di dunia yang sebesar 60 persen PDB, tingkat defisit APBN kita yang selama ini terjaga di angka 30 persen PDB dan ketika pandemi naik menjadi 41 persen PDB, menurut Piter adalah hal yang lumrah. “Jangan dibebani dengan upaya untuk menahan defisitnya melonjak terlalu tinggi. Karena kalau tantangan kita ditambahin, di satu sisi kita harus menanggulangi pandemi, juga menyelamatkan perekonomian, kemudian juga menjaga fiskal dengan sangat ketat, ruang (fiskal) kita menjadi sangat sempit. Kita menjadi sangat tidak leluasa untuk melakukan sesuatu,” ungkap Piter.

Fiskal sebagai ujung tombak

APBN 2022, menurut Piter, masih menjadi instrumen utama penggerak ekonomi. “Swasta masih belum bisa kita harapkan sepenuhnya. Swasta baru bisa bergerak kalau sudah ada stimulus dari pemerintah,” bebernya. Karena itu, Piter berpendapat dalam penyusunan RAPBN 2022 hendaknya

pemerintah berfokus pada pertama, penanggulangan pandemi. Pencegahan *second wave* dan pelanjutan penurunan kasus harian menjadi kunci utama pemulihan ekonomi.

Kedua, yang tak kalah penting juga, sebut Piter, menjaga semua pelaku ekonomi di Indonesia agar bisa tetap bertahan hidup agar ketika pandemi berakhir, kita bisa lebih mudah bangkit kembali. Kedua hal tersebut dijalankan melalui pemanfaatan ruang fiskal semaksimal mungkin sebagai pendorong perekonomian. Dengan begitu, Piter meyakini pertumbuhan ekonomi 2022 bahkan bisa melampaui target pemerintah yang sebesar 5,8 persen.

Senada, Said mengatakan prioritas belanja pemerintah harus tepat sasaran. Antara lain melalui penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, dan ketahanan pangan. Selain itu, pemulihan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur, serta dukungan untuk UMKM dan dunia usaha juga harus dilanjutkan. “Semua alokasi anggaran pemerintah pusat tersebut, harus berbasis kepada *output*, *outcome*, dan hasil yang terukur dengan baik (*result based*),” ujar Said.

Said juga berharap pemerintah mengoptimalkan pembenahan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) agar bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mengejar ketertinggalan daerah, khususnya desa. “Ekonomi desa hanya menyumbang 14 persen dari total PDB nasional, sedangkan 86 persen sisanya berasal dari perkotaan,” ungkapnya. Ia mendukung upaya pemerintah menjadikan kebijakan TKDD 2022 sebagai momentum untuk meningkatkan *quality control* anggaran, memberikan ruang bagi pemda dalam

pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah.

Agar tidak sekadar jargon

Kebijakan fiskal 2022 berfokus pada pemantapan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemantapan ekonomi melalui intervensi penanganan COVID-19 menjadi hal utama yang harus dilakukan, di samping mendorong bangkitnya sektor-sektor strategis pendongkrak ekonomi. Sedangkan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan penguatan reformasi birokrasi diperlukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Hasil Kajian Kementerian Keuangan dan Asian Development Bank menunjukkan kemampuan adopsi teknologi dan inovasi berpotensi meningkatkan 0,55 persen pertumbuhan ekonomi per tahun selama dua dekade ke depan. Lalu, G20 Surveillance Note mencatat 0,5 persen PDB untuk belanja infrastruktur mampu mendorong 1 persen pertumbuhan ekonomi per tahun dalam empat tahun berikutnya. Sementara reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah akan mendorong iklim usaha yang kondusif.

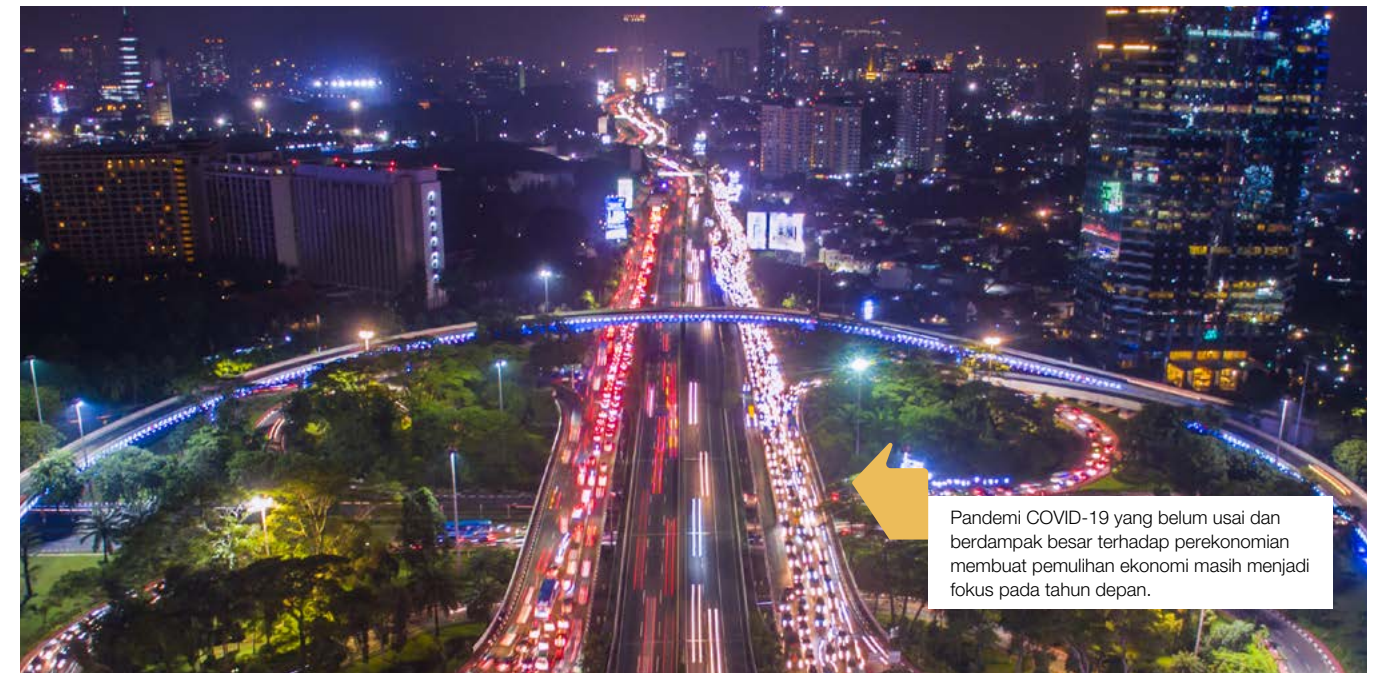
Piter sependapat reformasi struktural jangka menengah-panjang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan sumber daya. Namun, ia juga mengingatkan perlunya *road map* yang jelas agar reformasi struktural tidak menjadi jargon semata. “Kita perlu punya rujukan, yang kita maksud reformasi struktural itu seperti apa, akan kita lakukan berapa lama, dengan cara bagaimana, dan siapa saja yang akan terlibat di dalam reformasi struktural tersebut,” pungkas Piter.

Kebijakan fiskal 2022 berfokus pada pemantapan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Reformasi Struktural, Haruskah Segera?

Teks Reni Saptati D.I Foto iStock

Pembangunan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, dan *institutional development* menjadi fokus dari reformasi struktural.



Pandemi COVID-19 yang belum usai dan berdampak besar terhadap perekonomian membuat pemulihan ekonomi masih menjadi fokus pada tahun depan.

Konon, gagal merencanakan berarti merencanakan gagal. Itulah mengapa menyusun rencana keuangan tahunan pemerintah atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dengan penuh perhitungan. Selalu ada tantangan berbeda di tiap tahunnya. Di tengah situasi normal saja sudah sulit untuk merencanakan sesuatu, apalagi kala pandemi. Risiko dan ketidakpastian di masa pandemi jauh lebih besar dari situasi biasa.

Sesungguhnya, dalam sekali waktu, pemerintah melakukan hal-hal terkait APBN dari tiga tahun yang berbeda. “Pada tahun ini, kita sedang menjalankan audit oleh BPK untuk APBN tahun lalu. Lalu, kita menjalankan APBN 2021. Namun, pada saat yang bersamaan, saat ini kita juga memikirkan konten pembicaraan pendahuluan dengan DPR dalam bentuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk APBN 2022. Jadi memang inilah kesinambungan yang dilakukan dari tahun ke tahun,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu pada acara Dialogue

KiTa Kementerian Keuangan yang diselenggarakan 4 Juni 2021 lalu.

Banyak dari kita yang belum familiar dengan istilah KEM PPKF. Dokumen ini merupakan bagian dari proses perencanaan APBN dan memuat gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun depan. Setiap mengarungi perjalanan baru, kita perlu memiliki petunjuk terlebih dulu supaya tak tersesat. Seperti itulah gambaran pentingnya KEM PPKF bagi Indonesia. Pemerintah wajib menyampaikan dokumen KEM PPKF selambatnya tanggal 20 Mei tahun sebelumnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen ini menjadi bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN.

Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural

Tema yang dipilih untuk KEM PPKF 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pandemi COVID-19 yang belum usai dan berdampak besar terhadap perekonomian membuat pemulihan ekonomi masih menjadi fokus pada

tahun depan. Jumlah kasus di Indonesia yang mulai naik lagi pada bulan Juni ini makin memburamkan prediksi kapan pandemi bisa selesai di negeri ini. Upaya penanganan dampak kesehatan dan dampak sosial ekonomi dari pandemi telah dan akan terus dilakukan sampai pandemi berakhir.

Di sisi lain, tanpa adanya pandemi sekalipun, upaya reformasi struktural memang sudah perlu dijalankan segera di Indonesia. Febrio juga menjelaskan, selama ini Indonesia selalu merespons krisis yang pernah dihadapinya dengan melakukan perbaikan-perbaikan mendasar. Pada krisis ekonomi Asia tahun 1998, Indonesia melakukan reformasi menuju tatanan politik baru, termasuk penerapan otonomi daerah. Pada krisis keuangan global tahun 2008, Indonesia memperbaiki tata kelola sektor keuangan, yakni melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Respons serupa kembali diterapkan dalam krisis akibat pandemi COVID-19 dalam bentuk reformasi struktural. “*Challenge* yang kita dapatkan di perekonomian selalu direspons dengan perbaikan signifikan. Hal yang sama kita

lakukan pada 2020 dan 2021. Bagaimana saat menghadapi krisis yang sebenarnya masih tinggi ketidakpastiannya ini, kita tetap menyadari bahwa apa yang dibutuhkan itu harus didorong dengan segera. Inilah mengapa pada tahun lalu 2020 terbit UU Cipta Kerja,” terang Febrio.

Febrio meyakini pandemi COVID-19 menjadi momentum tepat untuk memperkuat reformasi. Ia menjelaskan fokus reformasi struktural ini terbagi menjadi tiga titik. Pertama, pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kedua, penyediaan infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, digital, energi, pangan, dan upaya mendorong industrialisasi. Terakhir, *institutional development* berupa reformasi birokrasi dan regulasi dan mendorong kemudahan berusaha.

Tumbuh di atas enam persen

“Di masa pandemi, risiko dan ketidakpastian itu berlipat-lipat,” ujar Analis Kebijakan Madya BKF Rahadian Zulfadin yang terlibat langsung dalam proses penyusunan KEM PPKF 2022. Ia sekilas menceritakan pengalaman yang dihadapi selama proses penyusunannya.

“Pertama, kondisinya sangat dinamis sehingga informasi yang kami miliki saat ini bisa jadi sudah *expired* pada minggu depan. Kedua, KEM PPKF harus disampaikan ke DPR tanggal 20 Mei. Kami harus mampu memanfaatkan waktu yang ada untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin. Ketiga, ada Idulfitri, ada libur dan suasana yang berbeda. Keempat, banyak pihak yang terlibat dalam proses ini,” lanjut Rahadian.

Menurutnya, krisis akibat pandemi

ini memperberat tantangan yang harus diatasi pemerintah. Sebelum pandemi saja sudah beragam tantangan struktural yang harus diselesaikan. Reformasi struktural sudah muncul dalam KEM PPKF 2020, yang berarti disusun pada tahun 2019. Kini, langkah tersebut harus segera dilakukan meski kondisi pascapandemi disebutkan sulit dibayangkan akan seperti apa.

“Kalau tanya reformasi, kita tidak akan pernah bisa tumbuh di atas enam persen. Dengan reformasi, kita ada peluang untuk tumbuh di atas enam persen. Angka ini adalah angka ekonomi yang menurut studi dari Bappenas dan Asian Development Bank akan membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2035,” tutur Rahadian.

Tahun 2035 penting bagi Indonesia, jelas Rahadian, sebab saat itu negeri zamrud khatulistiwa sudah mulai mengalami *aging population*. Jika saat ini masih banyak sekali anak muda usia kerja, pada tahun 2035 jumlah mereka akan menurun. Penduduk yang sudah mulai menua dan tak produktif lagi justru kian bertambah. “Tumbuh enam persen sebelum itu sangat penting. Di situlah pentingnya reformasi struktural,” tegasnya.

Reformasi fiskal harus hati-hati

Reformasi struktural perlu diimbangi dengan reformasi fiskal, tutur Rahadian. Upaya reformasi fiskal perlu dilakukan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat seiring dengan arah konsolidasi fiskal pada tahun 2023. “Fiskal itu instrumen utamanya APBN. APBN itu ada pendapatan, belanja, pembiayaan,” terangnya. Secara garis besar, reformasi fiskal akan diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang berkualitas (*spending better*), dan

pembiayaan kreatif.

“Reformasi fiskal harus dilakukan secara hati-hati supaya justru tidak menimbulkan dampak negatif ke perekonomian,” ungkap Rahadian. Misalnya, ingin mendapatkan penerimaan tinggi pada saat ekonomi masih lemah justru bisa berbahaya.

“Belanja maunya *spending better*. Selama ini belanja APBN masih tidak efisien. Sekarang hal ini dalam proses pembahasan dengan DPR, bagaimana supaya belanja pusat ataupun transfer ke daerah bisa lebih banyak diarahkan ke hal-hal yang sangat prioritas,” Rahadian menerangkan. Ia pun menyoroti belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang nilainya makin lama makin besar, tetapi masih banyak daerah yang masih menggantungkan transfer dari pusat untuk membiayai APBD-nya.

“Jadi masih ada daerah yang belum bisa mandiri. Kita berupaya bagaimana membantu daerah-daerah yang seperti itu supaya mereka bisa lebih mandiri dan bisa menggali potensi-potensi penerimaan dari daerahnya dengan cara meningkatkan aktivitas ekonomi di daerahnya. Itu memang proses yang sangat panjang,” kata Rahadian.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pemerintah akan berupaya mendapatkan pembiayaan yang lebih murah. Ia menyebut salah satu strateginya ialah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan yield lebih rendah.

“Kita juga bisa mengurangi beban APBN dengan membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs). Jadi, tidak semuanya harus dilakukan oleh APBN. APBN hanya sebagai *trigger* untuk melibatkan sektor swasta untuk membangun,” pungkasnya.



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



linktr.ee/bravobeacukai

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Fiskal 2022

Tahun 2022 menjadi tahun pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dengan terus berupaya untuk mengatasi pandemi, bonus demografi dan reformasi struktural terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas. Apa saja rencana yang akan dilakukan pemerintah di 2022 yang termuat dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2022 dan mengapa reformasi struktural perlu dilakukan di tahun depan?

Risiko dan Tantangan Indonesia dalam Pemulihan

Penanganan pandemi (termasuk varian baru COVID-19) dan pemulihan ekonomi
Ketidakpastian global
Tantangan struktural
Perubahan iklim dan disrupsi ekonomi digital

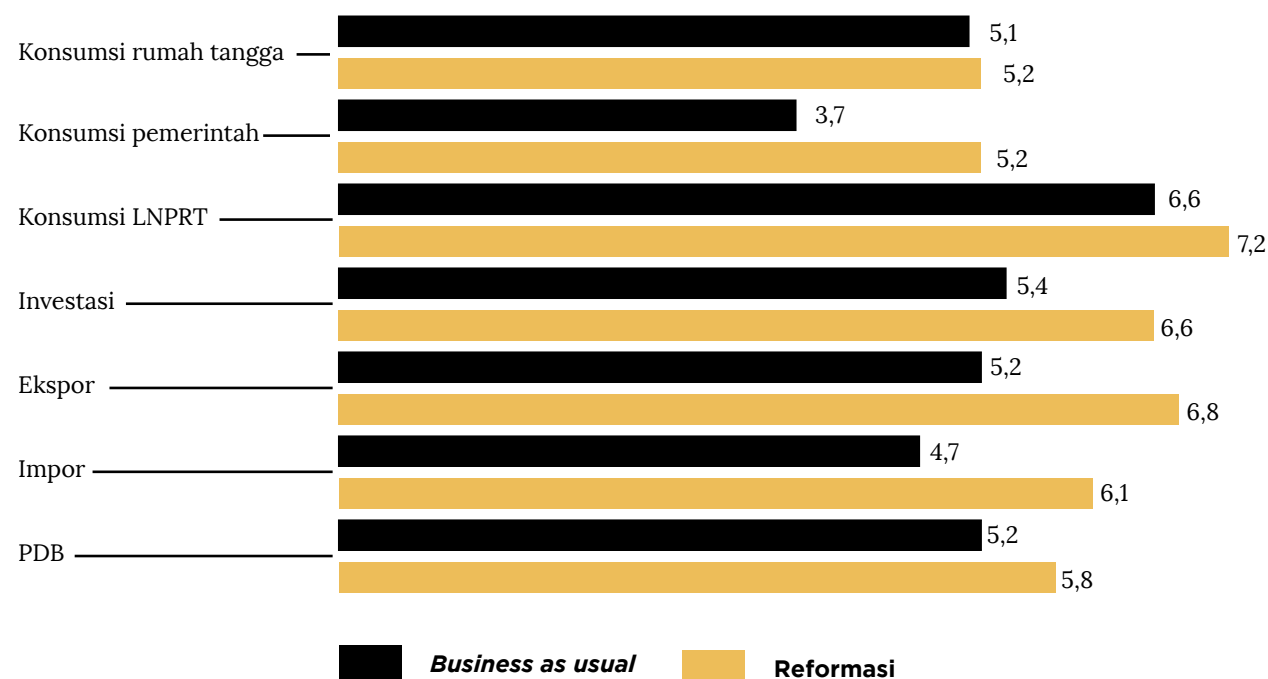
Faktor penentu untuk mencapai pertumbuhan tinggi

Investasi dan ekspor sebagai mesin pertumbuhan
Reformasi struktural yang membuka peluang investasi dan ekspor
Reformasi struktural yang membuka lapangan kerja

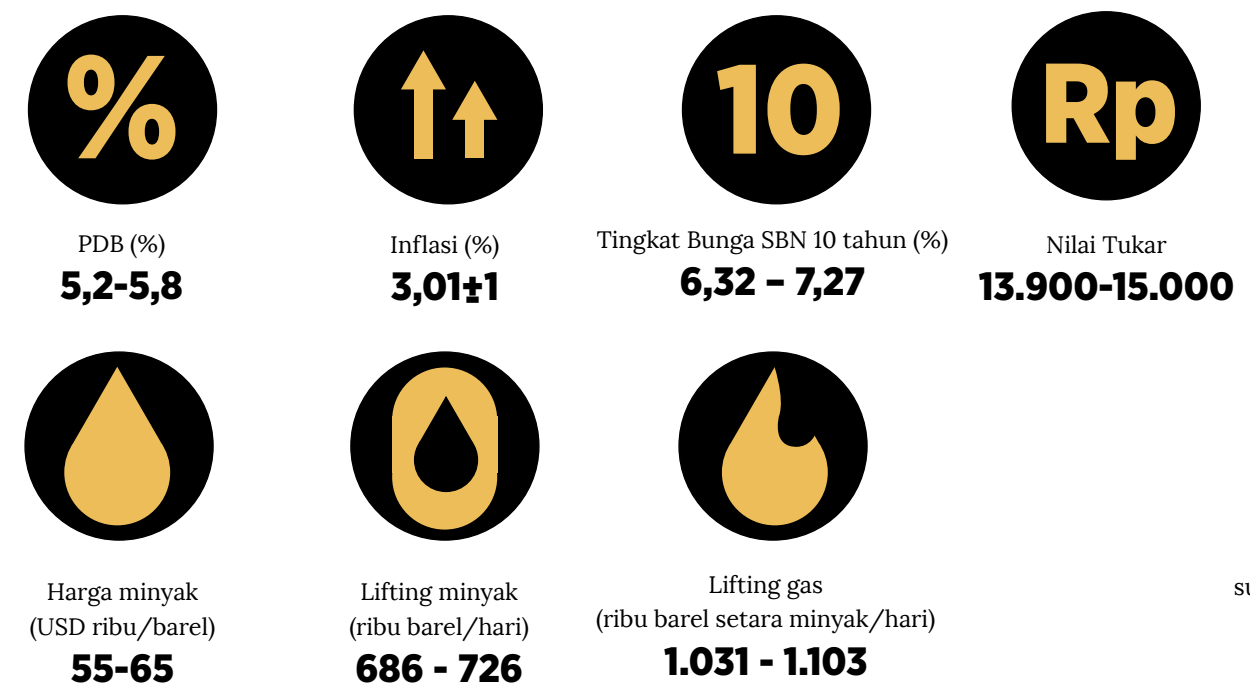
Fokus Reformasi Struktural

Pembangunan SDM: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial
Penyediaan infrastruktur: infrastruktur dasar, konektivitas, digital, energi, pangan, industrialisasi
Perbaikan institusi: reformasi birokrasi dan regulasi, kemudahan berusaha

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022



Asumsi Makro Tahun 2022



sumber: KEM PPKF 2022

Menjaga Budaya dan Sejarah Lewat Aksara

Teks Dimach Putra Foto Dok. Pribadi

Alfa bet bisa jadi satu-satunya sistem tanda grafis untuk berkomunikasi yang digunakan secara formal di Indonesia. Namun jauh sebelum mengenal a-z, manusia-manusia yang mendiami nusantara Indonesia telah menggunakan sistem abjadnya tersendiri. Beberapa asli dari kebudayaan setempat, lainnya bisa dari hasil adopsi dan adaptasi aksara dari kebudayaan lain.

Kami berbincang dengan Aldila Dwiki Himawan, salah satu pendiri Aksara di Nusantara (ADN). Pegawai swasta asal Gresik ini dan beberapa rekannya membentuk wadah bagi sekelompok orang yang mencintai dan secara sukarela mencoba mendokumentasikan keragaman aksara di nusantara. Baca petikan wawancara kami berikut ini.

Bisa diceritakan awal ketertarikan Anda mempelajari aksara-aksara nusantara?

Sekitar tahun 2010-2013, saya mulai tertarik dengan khasanah budaya Jawa karena sering mengikuti kegiatan komunitas Maiyah yang digagas oleh budayawan Muhammad Ainun Nadjib

atau lebih dikenal dengan Cak Nun. Di tahun-tahun itu secara kebetulan saya menemukan grup-grup yang mengulas tentang aksara-aksara di Indonesia.

Secara khusus juga berkenalan dengan Mas Aditya Bayu, seorang pemuda asal Jakarta yang menurut saya sangat ahli dan menggeluti serta mengkreasikan banyak *font* aksara. Di sana saya baru tahu jika banyak sekali aksara-aksara yang berkembang di Indonesia yang sayangnya tak lagi banyak yang menggunakan. Kemudian saya ajak Mas Bayu untuk membuat laman facebook "Aksara di Nusantara". Di tahun-tahun itu, saya juga cukup rutin datang ke Museum Majapahit di Trowulan, Mojokerto untuk ikut kegiatan pembacaan prasasti dalam aksara Jawa Kuno oleh komunitas Kojakun Sutasoma.

Seperti apa cerita di balik terbentuknya ADN?

Kami memulainya di Facebook. Dari data yang tersimpan di sana, laman ADN pertama kali dibuat tanggal 24 Mei 2015. Pendirinya adalah saya dan mas Aditya Bayu. Kami memilih *platform* itu karena kemudahannya menjangkau audiens. Kami lebih mudah mengajak teman-

teman di facebook yang berasal dari banyak kota untuk membuat konten aksara.

Tujuan kami adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang kekayaan ragam aksara yang terdapat di Indonesia. Kami ingin memperkenalkan kembali huruf-huruf yang telah digunakan di nusantara sejak masa lampau. Tentunya, itu kami lakukan dengan pendekatan yang lebih pop sesuai gaya informatif anak muda. Selain itu, kami juga ingin sekalian membuat koneksi dengan para penggiat aksara.

Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh ADN?

Di awal, kami fokus mengembangkan media dengan konten-konten grafis nuansa anak muda untuk ditampilkan pada laman facebook. Kemudian berkembang dengan membuat situsweb yang berfungsi sebagai sarana pengumpulan *font* aksara yang dikreasikan para *creator* yang bisa diunduh. *Platform* ini dibuat oleh mas Arif Budiarto, salah satu admin yang tergabung sejak awal ADN terbentuk. Situsweb kami bisa diakses di aksaradinusantara.com

Font aksara-aksara yang bisa



Aksara di Nusantara

Tak hanya media sosial, ADN berupaya melestarikan dan meningkatkan literasi aksara melalui acara televisi dan berbagai kegiatan lain.

Naskah dengan aksara Jawa.

diunduh di aksaradinusantara.com terpantau cukup banyak digunakan penggiat-penggiat aksara di konten yang mereka buat. Situsweb kami menjadi salah satu rujukan penyedia banyak *font* aksara yang bisa diunduh bebas. Tentu, dengan tetap menampilkan kontak penciptanya. Salah satu penggerak sekaligus admin ADN, mas Ridwan Maulana pada tahun 2019-2020 telah merampungkan buku yang mengulas (semua) aksara-aksara yang ada atau pernah ada di Indonesia. Bukunya berjudul "Aksara-Aksara di Nusantara: Seri Ensiklopedia".

Berapa banyak jenis aksara asli nusantara?

Istilah "asli" itu sebenarnya bisa diperdebatkan ya, karena kebanyakan aksara terpengaruh beberapa atau bahkan banyak bahasa dan kebudayaan. Data saat ini, aksara yang dipergunakan di Indonesia sekitar 15 aksara. Itupun

masih bisa dipecah menjadi variasi-variasinya. Juga bisa ditambahkan aksara-aksara rekaan baru.

Kami berharap agar aksara-aksara tersebut terdokumentasikan dengan baik. Hal ini selanjutnya bisa dibawa ke meja diskusi para penggiat kebudayaan dan pemerintahan. Tujuannya untuk dirumuskan kembali, disesuaikan dengan kebutuhan tutur saat ini. Setelah itu kita bisa membiasakannya untuk sebanyak mungkin digunakan. Minimal untuk keperluan sektor pariwisata.

Apa pentingnya menjaga eksistensi aksara nusantara?

Kita bisa melihat bagaimana Tiongkok, Jepang, Korea, bahkan Thailand menjadi berkembang dan mengglobalkan kebudayaannya tanpa kehilangan salah satu identitas kulturalnya, yakni aksara. Pada konten sosial media yang kami unggah, ada saja yang berkomentar "mirip aksara

Thailand ya". Komentar ini menyiratkan pemaknaan bahwa orang tersebut lebih mengenal aksara Thailand daripada aksara Jawa.

Pelestarian aksara bisa menjadi semacam katalog kunci pembuka kebudayaan. Jika suatu hari generasi setelah kita tergerak mencari akar kebudayaannya, maka gerbang awal harus dibuka dengan kunci berupa aksara-aksara yang telah disimpan dengan rapi, ataupun yang telah dipergunakan dengan semestinya.

Hibrida antara modernitas atau globalisasi dengan akar kebudayaan nusantara rasanya akan menjadi kunci penguatan karakter bangsa. Menjadi dirinya sendiri, tanpa tertinggal dari kompetisi dunia. Seperti yang ditunjukkan oleh Tiongkok, Jepang, Korea, dan Thailand. Dari sisi kekuatan ekonomi, dunia kreatif, musik, film, animasi, dan lain sebagainya.

Tahun Ajaran Baru Segera Tiba, Dana Pendidikan Apa Kabar?

Teks Value Foto Tino Adi P.

Memasuki bulan Juni, bagaimana kabar dana pendidikan anak-anak? Yups, biaya sekolah selalu merangkak naik setiap tahunnya. Kenaikan rata-ratanya mencapai 10–20% per tahun.

Memang, paling baik jika orang tua bisa menyekolahkan anak di sekolah negeri agar bisa menghemat. Namun karena berbagai alasan, tak semua orang tua memilih memasukkan anak-anaknya ke sekolah negeri. Apa pun jenis sekolah yang dipilih, sejatinya biaya pendidikan tetap harus disiapkan karena pada kenyataannya, pendidikan tetap saja butuh biaya ini itu. Apalagi, jika anak kita masuk perguruan tinggi negeri.

Sebenarnya apa saja yang menyebabkan biaya sekolah tinggi? Mari kita lihat.

Pertama, tuntutan kelengkapan fasilitas dari orang tua siswa. Orang tua zaman sekarang sadar betul pentingnya pendidikan anak yang berkualitas. Hal ini juga disadari betul oleh pihak sekolah yang menjalankan bisnisnya. Mereka pun berlomba untuk

memberikan penawaran fasilitas sekolah selengkap mungkin. Dampaknya pasti ke biaya. Semakin lengkap fasilitas yang ditawarkan, semakin tinggi pula biayanya. Semakin tinggi biayanya, para orang tua akan semakin ingin anaknya masuk ke sekolah berfasilitas lengkap tersebut.

Kedua, investasi guru. Kita sudah pasti menginginkan anak-anak diajar oleh mereka yang berkompeten. Bagi sekolah negeri, pengembangan kompetensi guru menjadi tanggung jawab negara. Untuk sekolah-sekolah swasta, lagi-lagi, biaya investasi kompetensi guru menjadi tanggung jawab orang tua siswa. Biayanya tentu tak sedikit. Kebutuhan akan guru berkualitas ini juga ditambah dengan adanya beban akreditasi sekolah setiap tahun yang akan menentukan kualitas sekolah itu sendiri.

Ketiga, *peer pressure*. Tekanan sosial orang tua yang merasa gengsi dan prestise meningkat ketika dapat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah terbaik juga ikut mempengaruhi kenaikan biaya sekolah. Orang tua saling berlomba menyekolahkan anak-anaknya di sekolah terbaik, hingga akhirnya hukum *supply vs demand* berlaku. Sekolah-sekolah (yang katanya) berkualitas diserbu oleh pendaftar sampai *waiting list*. Ketika *demand* melebihi *supply*, akhirnya kenaikan biaya pun menjadi keniscayaan.

Semua hal tersebut terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri, menyiapkan dana pendidikan anak sedini mungkin. Semakin cepat kita siap, maka beban akan semakin ringan. Apa saja yang bisa kita lakukan?

Cek kebutuhan

Kita menyekolahkan anak di sekolah tertentu karena mereka membutuhkan pendidikan yang baik. Bukan karena hal yang lain. Oleh karena itu, identifikasi kebutuhan anak agar proses pendidikannya bisa efektif dan efisien. Orang tua bertugas membantu anak mengenali diri mereka sendiri, mendampingi, dan memfasilitasi.

Hitung kebutuhan dan cek kondisi sekarang

Setelah mengenali kebutuhan anak-anak, lakukan survei sekolah mana yang sesuai. Kita bisa menyisihkan dana setiap bulan untuk tujuan keuangan dana pendidikan anak setelah kita tahu sekolah mana yang akan menjadi target. Hitung dengan memperhitungkan berapa lama lagi anak akan masuk ke sekolah tersebut, ditambah dengan

inflasi per tahun. Setelah itu, kita bisa merencanakan berapa banyak dana yang kita harus sisihkan.

Percayalah, mengetahui secara pasti biaya pendidikan anak dari sekarang akan membuat hati tenang karena kita akan terdorong mencari solusi yang tepat. Hal ini lebih baik daripada tidak tahu sama sekali kondisinya dan tiba-tiba terkejut melihat besarnya nominal yang harus disiapkan.

Tentukan instrumen

Ada beberapa instrumen investasi yang bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan dana pendidikan anak mulai dari reksa dana, saham, obligasi, dan sebagainya. Kenali karakteristik masing-masing, kemudian mulailah berinvestasi sesuai dengan profil risiko kita dan juga berpedoman pada horizon waktu yang sudah ditentukan.

Amankan jaring pengaman

Pastikan kamu juga sudah memiliki dana darurat dan asuransi yang dibutuhkan untuk melengkapi rencana dana pendidikan. Dana darurat, aset lancar lainnya, dan asuransi akan membuat perjalanan finansialmu akan lebih nyaman. Semua jaring ini dapat menghindarkanmu dari risiko keuangan yang bisa terjadi akibat hal-hal yang tak direncanakan.

Diversifikasi

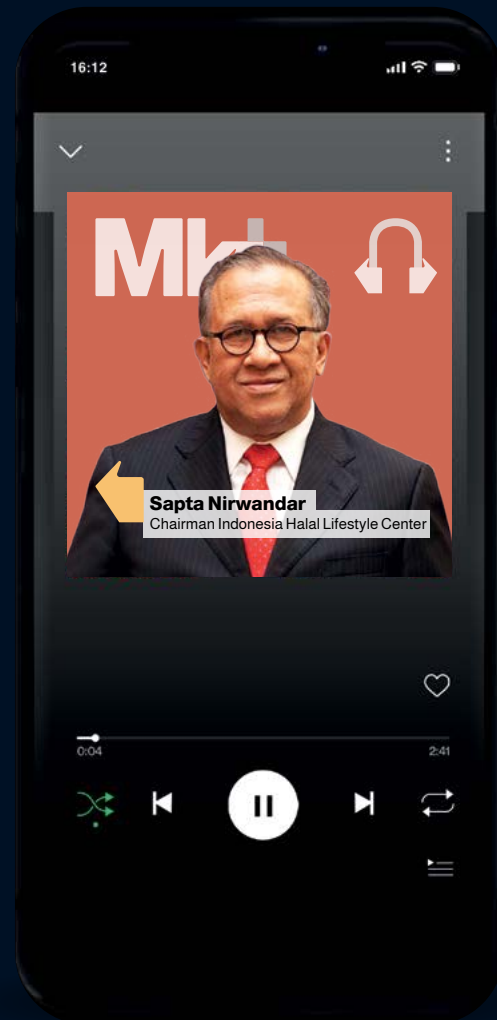
Diversifikasikanlah dana investasimu. Alokasikan sesuai dengan profil risiko yang kamu miliki. Mengapa harus didiversifikasi? Karena, jika terlalu banyak dana yang disimpan di instrumen rendah risiko, bisa jadi perkembangannya akan kurang optimal. Saat dibutuhkan, kemungkinan danamu belum cukup apalagi jika kamu setiap bulannya hanya dapat menyisihkan tak begitu banyak dari penghasilanmu.

Demikian pula, jika terlalu banyak dana diinvestasikan di instrumen yang agresif, maka risiko akan lebih tinggi. Ketika pasar sedang *volatile*—seperti saat ini, misalnya—nilai saham akan berfluktuasi tanpa bisa kamu kendalikan. Karenanya, kamu harus bisa mengelola risiko dana investasi ini dengan baik.

Dana pendidikan anak bisa jadi merupakan salah satu tujuan keuangan bernominal besar, selain dana rumah dan dana pensiun. Namun, dengan manajemen waktu, kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Keterampilanmu meramu instrumen investasi yang pas, mengelola *cash flow* dari penghasilanmu, dan juga menentukan target sekolah akan menjadi faktor utama berhasil tidaknya rencana ini.

Sekali lagi, bertolaklah dari apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Memilih sekolah untuk anak-anak, bukan untuk orang tua. Yuk, bisa yuk!

Mkt+ PODCAST

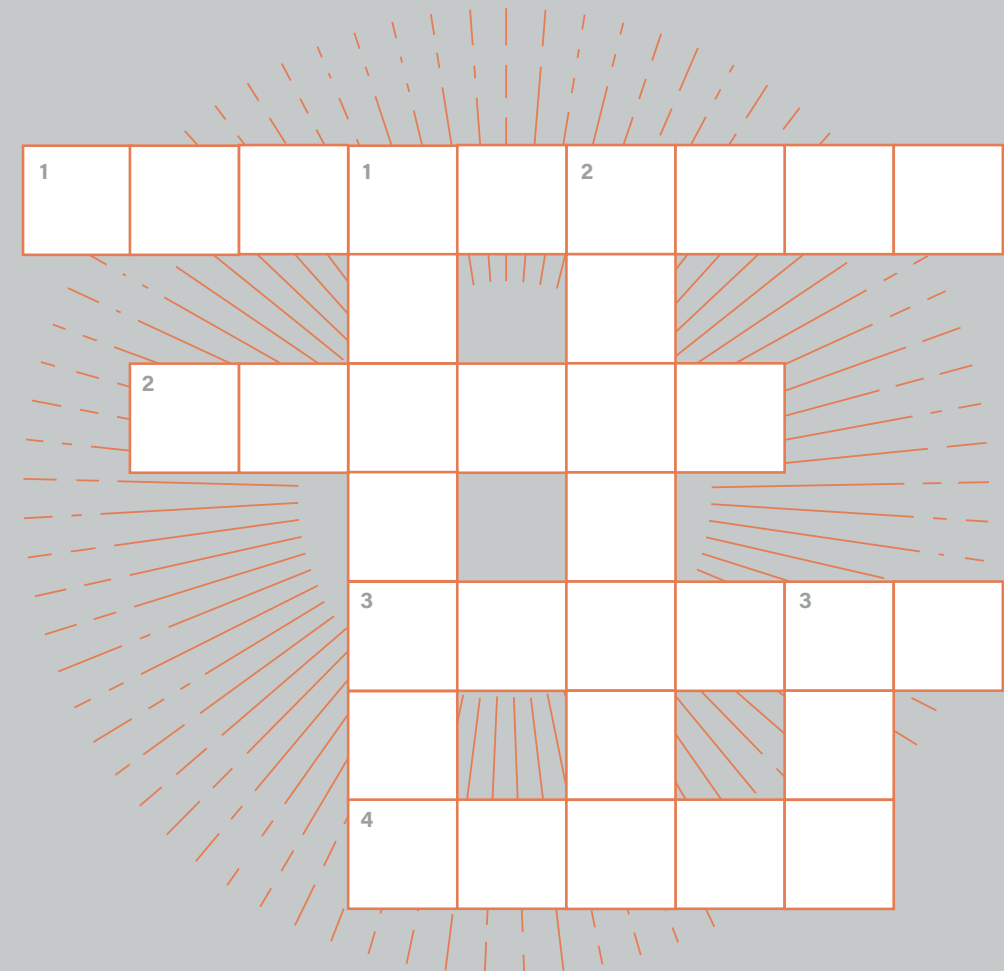


Dengarkan Podcast Media Keuangan di



Games

tekateki.



Mendatar:

1. Perubahan secara drastis untuk perbaikan
2. Bangkit kembali dalam ingatan
3. Tanaman, *Crinum asiaticum*
4. Suku bangsa asli Nusa Tenggara Barat

Menurun:

1. Universitas negeri di Maluku
2. Mujarab, efektif
3. Nomor Induk Kependudukan

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @majalahmediakeuangan atau melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Hari Yoga Internasional

21 Juni 2021



Foto iStock